



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

DOKUMEN CROSSCUTTING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025–2029

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas memerlukan sinergi dan keterpaduan antar perangkat daerah. Dalam konteks tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang memiliki peran strategis sebagai penyedia layanan administrasi kependudukan serta pengelola data kependudukan yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan perumusan kebijakan daerah.

Dokumen Crosscutting ini disusun untuk menggambarkan keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan perangkat daerah lainnya, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

II. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Crosscutting ini adalah:

- a. Mengidentifikasi keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan perangkat daerah lain.
- b. Mendorong sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemanfaatan data kependudukan.
- c. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan inovatif.

III. CROSSCUTTING SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. EKSTERNAL

- a. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Bentuk Crosscutting:

- Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja antar perangkat daerah.

- Integrasi data kinerja dan administrasi pemerintahan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan).
- Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perangkat Daerah Terkait:

1. Bappeda
2. BKPSDM
3. BPKD
4. Inspektorat
5. Seluruh perangkat daerah sebagai pelaksana kinerja

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Bentuk Crosscutting:

- Kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada masyarakat.
- Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh perangkat daerah pengguna layanan administrasi kependudukan sebagai dasar pemberian layanan.
- Penyelarasan standar pelayanan, inovasi layanan, dan sistem pengaduan masyarakat antar perangkat daerah.

Perangkat Daerah Terkait:

1. Dinas Kesehatan
Inovasi pelayanan terpadu dengan Rumah Sakit (RSUD) Padang Panjang, Puskesmas dan Bidan praktik mandiri. Saat bayi lahir, orang tua langsung mendapatkan Akta Kelahiran, KK baru dan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Dinas Sosial
Penyediaan data kependudukan yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada keluarga berisiko.
3. Dinas Pendidikan
Perekaman KTP-el Jemput Bola (Jempol) di sekolah-sekolah untuk siswa yang berusia 17 tahun ke atas.
4. DPMPTSP
Pelayanan terpadu.
5. Kemenkumham (Rutan Kelas IIB Padang Panjang)

Pemutakhiran data dan perekaman biometri bagi warga binaan.

6. Kementrian Agama (KUA) dan Kelurahan

Pengantin baru langsung mendapat KTP-el dan KK dengan Status baru, serta Akta Perkawinan (bagi non muslim).

c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat

Bentuk Crosscutting:

- Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan sebagai single source of truth dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik lintas perangkat daerah.
- Penguatan kerja sama antar perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan untuk penetapan sasaran program dan kebijakan.
- Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dalam pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data kependudukan.

Perangkat Daerah Terkait:

1. Bappeda

Integrasi Data "SIGADIS" (Sistem Informasi Geografis Analisa Data dan Informasi): Inovasi penunjang data kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan.

2. Dinas Sosial

Penyediaan data kependudukan yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada keluarga berisiko dan untuk menekan angka stunting.

3. Dinas Kesehatan

Penyediaan data kependudukan yang akurat untuk memastikan intervensi gizi untuk menekan angka stunting.

4. Dinas Pendidikan

Pemanfaatan data kependudukan (NIK) untuk efisiensi administrasi pendidikan, terutama dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), data pokok pendidikan (Dapodik), dan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sinergi ini mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan bagi siswa secara terintegrasi.

5. Diskominfo

Integrasi data kependudukan untuk penyelenggaraan "Satu Data" di tingkat pemerintah kota agar kebijakan publik lebih akurat.

2. INTERNAL

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan Bidang terkait.
- Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dalam Meningkatkan kualitas data kependudukan.
- b. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Bidang terkait.
- Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

IV. PENUTUP

Dokumen Crosscutting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ini menjadi landasan dalam memperkuat sinergi lintas sektor antar perangkat daerah. Dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan program, dan pemanfaatan data kependudukan, diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Padang Panjang, Januari 2025

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang



Rudy Suarman, AP
NIP. 19740918 199311 1 001